



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN, DAN
PENCATATAN SIPIL
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENATAAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KABL SUTRIYONO
2. Jabatan : KASI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA
3. NHK : 221232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	225.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	79.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.424.675
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	305.924.675
III. HUTANG	Rp.	65.333.320
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	240.591.355

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.